



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPI)  
TAHUN 2022**

**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Assamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas izin dan rahmatNYA sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2022 dapat disusun dengan baik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dengan demikian LPPD Tahun 2022 ini merupakan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2022 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dan mendukung dalam proses penyusunan LKPJ Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi, semoga dapat bermanfaat dalam memberikan informasi terhadap Penyusunan LKPJ Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2022.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Kotabaru, 20 Januari 2023

**Kepala Dinas,**

**Ir. H. Hardhani, M.Si**

Nip.19650401 199308 1 001

Pembina Utama Muda IV/c

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **BABI PENDAHULUAN**

#### **1.1. Dasar Hukum**

1.1.1. Dasar Hukum Penyusunan LKPJ

1.1.2. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

#### **1.2. Gambaran Umum**

1.2.1. Struktur Organisasi

1.2.2. Tugas Pokok dan fungsi

1.2.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat struktural dan Fungsional

1.2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana

### **BABII CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

2.1. Capaian Pelaksanaan program dan kegiatan

2.2. Kebijakan Strategis yang dilaksanakan

2.3. Capaian Indikator Kinerja kunci keluaran (Output)

2.4. Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

2.5. Capaian Kinerja Kunci untuk fungsi penunjang Urusan pemerintahan

2.6. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.7. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun anggaran Sebelumnya (\*Lihat Keterangan pada Catatan)

### **BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

3.1. Tugas Pembantuan pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1. Target Kinerja

3.1.2. Realisasi

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1. Target Kinerja

3.2.2. Realisasi

3.3. Permasalahan dan kendala

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

#### BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Yang dilaksanakan

4.1.1. Jenis pelayanan Dasar

4.1.2. Target pencapaian SPM

4.1.3. Realisasi

4.1.4. Alokasi Anggaran

4.1.5. Dukumen Personil

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

#### BAB V PENUTUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 DASAR HUKUM**

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan pembangunan agar mampu eksis, unggul, dan mampu memberikan kontribusi serta peran nyata dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah daerah maka instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

##### **1.1.1. Dasar Hukum Penyusunan LKPJ**

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar Akutansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah.
9. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
10. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/2004 tentang penetapan kinerja.

11. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja.
12. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan indicator kinerja utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan, organisasi dan tata kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2009 tentang organisasi dan tata kerja kementrian Negara perdayaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi.
15. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 13 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2010.
16. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Lakip.
17. Pepres No 29 Tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 tahun 2017 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kotabaru Tahun 2017 Nomor 30 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 30);

### **1.1.2. Dasar Hukum Pembentukan SKPD**

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang mampu memberikan kontribusi serta peran nyata dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kotabaru berpedoman pada peraturan yang ada antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2019 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 4);
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, organisasi tugas pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab Kotabaru.

## **1.2 GAMBARAN UMUM**

### **1.2.1. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2019 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 4); dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru.

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab Kotabaru terdiri Kepala Dinas, Sekretaris, 5 (lima) Bidang, 13 (tigabelas) seksi, 3 (tiga) Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri dari :
  - 1) Subbagian Perencanaan ;
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
  - 3) Subagian Keuangan ;
- c. Bidang Koperasi terdiri dari :
  - 1) Seksi Kelembagaan dan pengawasan Koperasi;
  - 2) Seksi Bina Usaha Koperasi ;
  - 3) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
- d. Bidang Usaha mikro terdiri dari :
  - 1) Seksi pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro ;
  - 2) Seksi Pengembangan Kewirausahaan ;
- e. Bidang Perindustrian terdiri dari :
  - 1) Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri;
  - 2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri ;
  - 3) Seksi Sistem Inpormasi dan fasilitasi Industri ;
- f. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan
  - 1) Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - 2) Seksi Pengawasan dan perlindungan Konsumen;
- g. Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan
  - 1) Seksi Pengelola sarana dan Prasarana Distribusi;



- 2) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan;
- 3) Seksi Stabilitas barang pokok dan Penting;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.2.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru yang beralamat di Jalan Putri Ciptasari Komplek Pasar kemakmuran Kotabaru Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru. Pembentukan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2019 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 4); dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut ;

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
- c. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang koperasi;
- d. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang usaha mikro;
- e. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang perindustrian;
- f. Penyelenggaraan, Pengkoordinasian dan evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang Kemetrolagian dan pengawasan perdagangan;
- g. Penyelenggaraan, Pengkoordinasian dan evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang stabilitasi dan sarana distribusi perdagangan;
- h. penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. penyelenggara pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- j. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di UPTD; dan
- k. penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1. Kesekretariat.**

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian.

### **2. Bidang Koperasi**

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas di bidang koperasi yang

meliputi kelembagaan dan pengawasan koperasi, peningkatan kualitas SDM dan bina usaha koperasi.

**a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi**

Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang koperasi dalam kelembagaan dan pengawasan Koperasi

**b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi**

Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang koperasi dalam peningkatan kualitas SDM Koperasi.

**c. Seksi Bina Usaha Koperasi**

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Bidang Koperasi dalam Pembinaan dan Pengelolaan Bina Usaha Koperasi.

**3. Bidang Usaha Mikro**

Bidang usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas-tugas di bidang usaha mikro yang meliputi pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro dan pengembangan kewirausahaan.

**a. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro**

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro dalam pemberdayaan dan fasilitasi usaha mikro.

**b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan**

Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang usaha mikro dalam pengelolaan pengembangan kewirausahaan.

#### **4. Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas di bidang perindustrian yang meliputi pembangunan dan pengembangan pembangunan industri, perizinan dan inovasi industri, dan sistem informasi industri.

##### **a. Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri**

Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dalam Pemberdayaan dan inovasi industri.

##### **b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri**

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Industri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dalam pembangunan dan pengembangan industri.

##### **c. Seksi Sistem Informasi dan Fasilitas Industri**

Seksi Sistem Informasi dan Fasilitas Industri mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perindustrian dalam sistem informasi dan Fasilitas industri.

#### **5. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan**

Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan dan memeriksa tugas-tugas di bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan yang meliputi pelayanan tera dan tera ulang, pembinaan jabatan fungsional bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan.

##### **a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang**

Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan dalam pelaksanaan tera, dan tera ulang alat ukur.

#### **b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**

Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang kemetrolagian dan pengawasan perdagangan dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan konsumen.

#### **6. Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan**

Bidang Stabilisasi dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyedia dan memeriksa tugas di bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan yang meliputi pembangunan sarana distribusi perdagangan, pembinaan, pengelolaan sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting.

##### **a. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Distribusi**

Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan dalam pelaksanaan pembangunan sarana distribusi perdagangan.

##### **b. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan**

Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan dalam pembinaan usaha perdagangan.

##### **c. Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting**

Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang stabilisasi dan sarana distribusi perdagangan dalam pelaksanaan stabilisasi barang pokok dan penting.

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

### 1.2.3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 138 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, organisasi tugas pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab Kotabaru memiliki sumber daya manusia (SDM) pada Tahun 2022 sebanyak 64 orang, dan didukung tenaga non PNS sebanyak 75 orang, sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 64 orang;
2. Tenaga Non PNS (TNP) sebanyak 75 orang terdiri dari ;
  - a. 45 Orang Tenaga Kebersihan
  - b. 30 Orang Tenaga Administrasi lainnya

Rincian pegawai PNS dan TNP dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a. Jumlah Pegawai Struktural

NO	JABATAN STRUKTURAL	JUMLAH (ORANG)	KET
1	<b>Kepala Dinas</b>	1	
2	<b>Sekretaris</b>	0	
	a. Subbagian Perencanaan	1	
	b. Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	
	c. Sub Bagian Keuangan	-	
3	<b>Bidang Koperasi</b>	1	
	a. Seksi Kelembagaan dan pengawasan Koperasi;	-	
	b. Seksi Bina Usaha Koperasi ;	1	
	c. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	1	
4	<b>Bidang Usaha mikro</b>	1	
	a. Seksi pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Mikro	1	
	b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan	1	
5	<b>Bidang Perindustrian</b>	1	
	a. Seksi Pemberdayaan dan Inovasi Industri;	0	
	b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri	1	
	c. Seksi Sistem Inpormasi dan fasilitas Industri	0	
6	<b>Bidang Kemetrlogian dan Pengawasan Perdagangan</b>	1	
	a. Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	
	b.. Seksi Pengawasan dan perlindungan Konsumen	-	
7	<b>Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	1	
	a. Seksi Pengelola sarana dan Prasarana Distribusi	-	
	b. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan	1	
	c. Seksi Stabilitas barang pokok dan Penting	1	
8	<b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>		

**b. Kualifikasi pendidikan**

**Tabel 1**

Jumlah PNS dan Non PNS Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan menurut Golongan dan pendidikan Tahun 2022

No	Jumlah pegawai menurut						Keterangan		
	Golongan	Jumlah	%	Pendidikan	Jumlah	%	Jabatan	Jumlah	%
1	I	6 org		SD/SMP	6 org		Struktural	18 Org	
2	II	28 org		SMA	28 org		Fungsional khusus	4 org	
3	III	22org		DIII	3 org		Fungsional	38 org	
4	IV	4 ORG		S1	17 org				
				S2	6 org				
				S3	0 org				
Tenaga Non PNS									
1	TNP	65 org		SD/SMP	30 ORG		Petugas kebersihan pasar	45 org	
				SMA	26 org		Administrasi	20 org	
				S.1	9 org				

**Tabel 2**

SDM Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Pada Tahun 2022 Menurut eselon / Golongan.

NO	Jumlah pejabat menurut					
	Eselon	Jumlah	%	Golongan	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7
	II	1 org		I a	0 org	
	III	3 org		I b	2 org	
	IV	13 org		I c	3 org	
	Non eselon	43 org		I d	1 org	
				II a	1 org	
				II b	9 org	
				II c	12 org	
				II d	6 Org	
				III a	4 org	
				III b	3 Org	
				III c	7 org	
				III d	8 org	
				IV a	3 Org	
				IV b	0 org	
				IV c	1 org	
				IV d	0 Org	

**Tabel 3**

Keadaan SDM Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Kotabaru Pada Tahun 2022 Menurut  
Penempatan/Penugasan.

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan	
			Diisi	Kosong
1	Kepala Dinas/Badan	1 Org	1	0
2	Sekretaris	1 org	1	0
3	Kepala Bidang	5 org	4	1
4	Kasub Bag	3 org	2	1
5	Kapala seksi	13 org	8	5

Adapun Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotabaru dapat dilihat dalam daftar lampiran

#### **1.2.4. KONDISI SARANA DAN PRASARANA**

Sarana prasarana sangat berpengaruh langsung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotabaru sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja walaupun ada beberapa sarana prasarana yang masih kurang serta mengalami kerusakan. Selain itu seluruh komputer sudah berjaringan internet melalui wifi dan sudah memiliki alamat website serta email resmi. Berikut ini perkembangan Data Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru dapat dilihat dalam daftar sebagai berikut.

Table. 1.2.4



## Daftar inventaris Sarana dan prasarana

N0	Jenis sarana dan prasarana	Keterangan
1	Mobil	baik
2	Sepeda motor	baik
3	Filling besi/metal	baik
4	Band kas	baik
5	Lemari kayu	baik
6	Papan nama instansi	baik
7	Papan pengumuman	baik
8	Papan tulis	baik
9	Whiteboard	baik
10	Overhead projektor	baik
11	Meja kayu	baik
12	Kursi besi/metal	baik
13	Kursi kayu	baik
14	Meja rapat	baik
15	Meja tulis	baik
16	Kursi rapat	baik
17	Kursi putar	baik
18	Kursi biasa	baik
19	Kursi lipat	baik
20	Sofa	baik
21	Mebeuler lainnya	baik
22	Lemari arsip	baik
23	Alat pembersih lain-lain	baik
24	Lemari Es	baik
25	AC Unit	baik
26	Kipas Angin	baik
27	Televisi	baik
28	Sound Sistem	baik
29	Tiang Bendera	baik
30	Tangga Alumunium	baik
31	Dispenser	baik
32	Alat Rumah Tangga Lain-lain	baik
33	Gordin/Vitras	baik
34	Notebook	baik
35	Personal Komputer Lain-lain	baik
36	Printer	baik
37	Scenner	rusak
38	Meja Kerja Pejabat Eselon II	baik
39	Kursi Pejabat Eselon II	baik
40	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	baik
41	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	baik
42	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinas	baik
43	Lemari & Arsip Pejabat lain-lain	baik
44	Micropon/Wirelles Mic	baik
45	CCVT	rusak
46	Camera Electron	baik
47	Sound Sistem	baik
48	Facsilime	rusak
49	Bangunan Gedung Kantor Permanen	baik
50	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	baik
51	Gedung Pertokoan/ Pasar Permanen	baik
52	Gedung Pertokoan/Pasar Semi Permanen	baik
53	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	baik
54	Bangunan Gedung Fasilitas Umum Lainnya	baik
55	Instalasi Air Bersih Lain-lain	baik
56	Jaringan Telepon/internet	baik

## **BAB II**

### **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan**

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk Tahun Anggaran 2022 mempunyai 13 ( tigabelas) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan untuk program dan kegiatan tersebut terbagi menjadi dua urusan, yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Untuk urusan wajib ada 1(satu) program rutin, 3 (tiga) program dibidang koperasi, 2 (dua) program bidang Usaha mikro. Untuk urusan pilihan ada 4 (empat) program dibidang Stabilitas sarana dan prasarana distribusi perdagangan,1(satu) program di bidang Metrologi dan pengawasan Perdagangan, dan 3 (tiga) program dibidang Industri. Anggaran yang tersedia untuk Belanja Program dan kegiatan sebesar Rp. 20.658.790.862,- terealisasi sebesar Rp. 16.433.677.984.- atau pencapaian 79,60 % dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

##### **1. Keg. Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

##### **1. Sub Keg.Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 229.085.000,- terealisasi sebesar Rp.224.810.058.- atau 98,13% digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan belanja rapat. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah dokumen perencanaan sebanyak 3 dok selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.1**

Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah Tahun 2022

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	229.085.000,-	224.810.058.-
2	Keluaran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	3 duk	3 duk
3	Hasil	Dokumen perencanaan	100 %	98,13 %

**2. Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 136.145.500,- terealisasi sebesar Rp.135.679.000.- atau 99.66% digunakan untuk rapat koordinasi dan evaluasi kinerja Hasil yang dicapai / out come kegiatan yaitu jumlah evaluasi kinerja sebanyak 1 dok selama 12 bulan dengan baik di lingkungan kantor Dinas. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.2**

Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Tahun 2022

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	136.145.500,-	135.679.000.-
2	Keluaran	Jumlah evaluasi kinerja	1 duk	1 duk
3	Hasil	Dok Evaluasi kinerja	100 %	99,66%

**2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah****3. Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 6.939.008.692,- terealisasi sebesar Rp. 6.175.300.933.- atau 88,99% digunakan untuk Melakukan pembayaran gaji, tunjangan dan insentif . Hasil yang dicapai / out come kegiatan yaitu jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pns sebanyak 26 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.3**

Sub Keg. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tahun 2022

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	6.939.008.692,-	6.175.300.933
2	Keluaran	jumlah pegawai yang dibayar	26 kl	26 kl
3	Hasil	Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan	100%	88,99 %

4. **Sub Keg.Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.378.327.200,- terealisasi sebesar Rp.1.368.727.200.- atau 99,30% digunakan untuk Melakukan Membayar honorarium kegiatan dan tertib administrasi keuangan. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan sebanyak 12 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.4**  
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	1.378.327.200,-	1.368.727.200.-
2	Keluaran	jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan	12 kl	12 kl
3	Hasil	Membayar honorarium kegiatan dan tertib adminstrasi keuangan	100 %	99,30

5. **Sub Keg.Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 488.585.000- terealisasi sebesar Rp. 459.665.000.- atau 94.08% digunakan untuk Melakukan Membayar honorarium verifikasi keuangan. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD sebanyak 12 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.5**  
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	488.585.000-	459.665.000.-
2	Keluaran	jumlah dokumen penatausahaan keuangan SKPD	12 kl	12 kl
3	Hasil	Terbayar honorarium pengelola kegiatan dan veroifikasi keuangan	100 %	94.08%

**6. Sub Keg.Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.500.000,- terealisasi sebesar Rp.3.500.000- atau 100% digunakan untuk Melakukan penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dok selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.6**

Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	3.500.000,-	3.500.000
2	Keluaran	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dok	1 dok
3	Hasil	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	100%	100%

**7. Sub Keg. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- atau 100% digunakan untuk penyusunan dokumen analisis dan realisasi keuangan semesteran. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah dokumen laporan dan analisi prog realisasi anggaran sebanyak 1 duk selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.7**

Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	1.000.000,-	1.000.000
2	Keluaran	jumlah pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja	1 duk	1 duk
3	Hasil	Kendaraan operasional angkutan sampah dapat dipungsikan/ dipergunakan kembali	100 %	100%

### 3. Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah

#### 8. Sub Keg.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.950.000,- Atau 100% digunakan untuk penyediaan komponen instalasi listrik dan penggantian lampu, penerangan blok-blok pasar serta lingkungan pasar. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 12 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.8**  
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	29.950.000,-	29.950.000,-
2	Keluaran	jumlah penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 kl	12 kl
3	Hasil	Kantor, blok toko/kios pasar, selasar dan halaman terang -Pengawasan petugas tetap terjaga dengan baik	100 %	100%

#### 9. Sub Keg.Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.278.200,- terealisasi sebesar Rp. 33.273.800 atau 99,99% digunakan untuk penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 12 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.9**  
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	33.278.200,-	33,273.800.-
2	Keluaran	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 kl	12 kl
3	Hasil	lingkungan pasar dan kantor bersih	100%	99.99%

#### 10. Sub Keg. Penyediaan bahan logistic Kantor.

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 489.272.000,- terealisasi sebesar Rp. 488.818.609.- atau 91,73% digunakan untuk operasional kantor dan kegiatan lapangan. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan bahan logistic kantor sebanyak 12 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 2.10 di bawah ini :

**Tabel 2.1.10**  
Penyediaan bahan logistik Kantor

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	489.272.000,-	488.818.609.-
2	Keluaran	jumlah penyediaan bahan cetak ,rapat keg lapangan	12 kl	12 kl
3	Hasil	Untuk kebutuhan makan dan minum bagi pegawai dan petugas keamanan	100%	91,73%

#### 11. Sub Keg.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.100.100,- atau 91,71% digunakan untuk bahan cetak pengelolaan administrasi penerimaan retribusi daerah .hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 12 Kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.11**  
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	35.000.000	32.100.100.-
2	Keluaran	jumlah barang cetakan blanko penerimaan retribusi pasar.	12 kl	12 kl
3	Hasil	Peningkatan tertib administrasi penerimaan retribusi daerah.	100%	91,71%

#### 12. Sub Keg.Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7.500.000,- terealisasi sebesar Rp.7.500.000,- atau 100% digunakan untuk bahan bacaan dan peningkatan pengetahuan dan wawasan. Hasil yang dicapai/out

come kegiatan yaitu jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, selama 12 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.12**  
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	7.500.000	7.500.000.-
2	Keluaran	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	12 kl	12 kl
3	Hasil	Menambah wawasan dan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan perundang-undangan.	100%	100%

**13. Sub Keg. Pasilitasi kunjungan tamu.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 42.050.000,- terealisasi sebesar Rp.41.965.000,-atau 99,80% digunakan untuk kebutuhan makanan dan minuman tamu. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 14kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.13**  
Fasilitasi kunjungan tamu

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	42.050.000,-	41.965.000,-
2	Keluaran	jumlah tamu yang datang .	14 kl	14 kl
3	Hasil	Terlayani tamu yang datang	100%	99,80%

**14. Sub Keg.Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 465.988.000,- terealisasi sebesar Rp. 461.577.544.- atau 99,05% digunakan untuk Melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka untuk mendukung pembangunan daerah. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPDyang dialksanakan sebanyak 75 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 2.1.14**

Penyelenggaraan rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	465.988.000,-	461.577.544
2	Keluaran	jumlah penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	75 kl	75 kl
3	Hasil	Penyampian inpormasi program dan kegiatan pembangunan daerah	100%	99.05%

#### **4.Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **15. Sub Keg. pengadaan peralatan dan mesin lainnya.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 135.292.070,- terealisasi sebesar Rp.127.727.700.- atau 94,41% digunakan untuk Melaksanakan berbagai kegiatan dan untuk mendukung pelaksanaan tugas . Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah pengadaan peralatan dan mesinlainnya yang diadakan sebanyak 6 unit selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.15**

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	135.292.070,-	127.727.700
2	Keluaran	jumlah pengadaan peralatan dan mesinlainnya yang diadakan	6 unit	6 unit
3	Hasil	Melaksanakan berbagai kegiatan administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas	100%	94,41%

#### **5. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **16. Sub Keg.Penyediaan jasa surat menyurat.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp.15.000.000.- atau 100% digunakan untuk Melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kwitansi bermaterai dan pemindahbukuan. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 1500 lbr selama

12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.16**  
Penyediaan jasa surat menyurat

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	15.000.000	15.000.000
2	Keluaran	jumlah penyediaan jasa surat menyurat	125 lbr	125 lbr
3	Hasil	Tertib adminitrasi jasa surat menyurat	100%	100%

**17. Sub Keg. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 401.000.000,- terealisasi sebesar Rp.345.239.004,- atau 86,09% digunakan untuk pembayaran rekening telpon, air dan listrik. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik sebanyak 4 langganan selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.17**  
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	401.000.000	345.239.004
2	Keluaran	jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air dan telpon	4 langganan	4 langganan
3	Hasil	Terlaksananya pembayaran rekening listrik air telpon	100%	86,09%

**18. Sub Keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 180.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 180.000.000,- atau 99,67% digunakan untuk kegiatan jasa pelayanan umum kantor. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.1.18**  
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	180.600.000	180.000.000
2	Keluaran	jumlah pembayaran honorarium petugas clening service kantor	12 kl	12 kl
3	Hasil	Tertib pengawasan dan terciptanya kebersihan kantor yang sehat dan nyaman	100%	99.67%

## **6. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah**

### **19. Sub Keg. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 153.977.000.- terealisasi sebesar Rp.145.649.755,- atau 94,59% digunakan untuk pembayaran pajak kendaraan operasional, jasa service, suku cadang dan operasional angkutan sampah. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan sebanyak 4 unit selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.1.19**  
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	153.977.000	145.649.755,-
2	Keluaran	jumlah kendaraan operasional, pajak dan perijinan	4 unit	4 unit
3	Hasil	Terbayar kendaraan operasional dan penggantian suku cadang	100%	94,59%

### **20. Sub Keg. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 70.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.390.000.- atau 98.73% digunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor. Hasil yang dicapai /out come kegiatan yaitu jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan sebanyak 40 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.20**

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	70.400.000,-	39.390.000.-
2	Keluaran	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	40 kl	40 kl
3	Hasil	untuk kelancaran administrasi pelayanan dan kelancaran kinerja	100%	98,73%

**2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

**7. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/kota.**

**21. Sub Keg. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.130.000.000,- terealisasi sebesar Rp.129.594.000.- atau 99,69% digunakan untuk Melakukan pengawasan kekuatan, kesehatan kemandirian dan ketangguhan koperasi. hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan kemandirian dan ketangguhan serta akuntabilitas koperasi sebanyak 3 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.1.21**

Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	130.000.000	129.594.000
2	Keluaran	jumlah pengawasan kekuatan ,kesehatan kemandirian dan ketangguhan serta akuntabilitas koperasi	3 kl	3 kl
3	Hasil	Peningkatan pengawasan pengelolaan dan pengurus koperasi	100%	99,69 %

22. **Sub Keg.Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/Kota.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 85.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 85.301.000.- atau 99,65% digunakan untuk peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 4 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.22**

Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/Kota

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	85.600.000	85.301.000.-
2	Keluaran	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	4 kl	4 kl
3	Hasil	Peningkatan pengetahuan dan wawasan pengurus koperasi tentang peraturan perundang-undangan	100%	99,65 %

**3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

**8. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota.**

**23. Sub Keg. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan**

**perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 294.650.700,- atau 98,09% digunakan untuk memberikan Pendidikan dan peningkatan pengetahuan SDM pengurus dan pengelola koperasi hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi sebanyak 2 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1.23**

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kopetensi SDM koperasi

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	300.400.000,-	294.650.700.-
2	Keluaran	jumlah peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	2 kl	2 kl
3	Hasil	Peningkatan pengetahuan dan sdm bagi pengelola dan pengurus koperasi	100%	98,09%

#### 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

##### 9. Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten /kota.

**24.Sub Keg.Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rekstukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota.** Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.000.000,- terealisasi sebesar Rp.89.890.000,- atau 99,88% digunakan untuk peningkatan produktivitas ,akses pasar pembiayaan pengutamaan kelembagaan usaha koperasi. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah akses pasar pembiayaan, penguatan kelembagaan penataan manajemen standarisasi dan rentruksurisasi usaha koperasi. Sebanyak 2 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1.24**

Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan, manajemen standarisasi dan rekstukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	90.000.000	89.890.000
2	Keluaran	Jumlah pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah akses pasar pembiayaan, penguatan kelembagaan penataan manajemen standarisasi dan rentruksurisasi usaha koperasi.	2 kl	2 kl
3	Hasil	Peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan usaha koperasi	100%	99.88%

## **5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

### **10. Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan**

#### **25.Sub Keg.Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.850.390.000,- terealisasi sebesar Rp.644.493.500,- atau 22,61% digunakan untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha mikro. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro sebanyak 180 klp/umk selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.1.25**

Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	2.850.390.000,-	644.493.500
2	Keluaran	Jumlah pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	180 klp	6 klp
3	Hasil	Tersedianya data usaha /klp usaha mikro	100%	22,61 %

#### **26. Sub Keg.Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 160.000.000,- terealisasi sebesar Rp.157.299.000,- atau 98,31% digunakan untuk memberikan fasilitasi dalam perijinan usaha mikro. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro sebanyak 30 UMK selama 12 bula. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.1.26**

Pasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	160.000.000	157.299.000
2	Keluaran	jumlah fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	30 umk	30 umk
3	Hasil	Memudahkan pemasaran usaha mikro yang memiliki legalitas	100%	98,31%

**27. Sub Keg. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 199.700.000.- atau 99,35% digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha sebanyak 29 umk selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.27**  
Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	200.400.000	199.700.000
2	Keluaran	Jumlah pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	30 umk	30 umk
3	Hasil	Pengembangan potensi usaha mikro	100%	99,35

**6. Program Pengembangan UMKM**

**11. Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha mikro**

**28. Kegiatan Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, serta desain dan teknologi.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 410.060.000,- terealisasi sebesar Rp. 394.543.747,- atau 96,22% digunakan untuk memfasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil, pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran desain dan teknologi. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dlm pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SSM serta desain dan tehnologi sebanyak 128 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 2.1.28**

Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, serta desain dan teknologi

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	410.060.000	394.543.747
2	Keluaran	jumlah fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM serta desain dan teknologi	128 kl	126 kl
3	Hasil	Para pengurus koperasi mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian	100%	96,22%

## **7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

### **12. Kegiatan Penerbitan tanda daftar gudang**

#### **29. Sub Keg Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 85,247.500,- atau 85,25% digunakan untuk fasilitasi layanan penerbitan tanda daftar gudang. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang sebanyak 8 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.1.29**

Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	100.000.000,	85,247.500
2	Keluaran	jumlah rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang	8 kl	7 kl
3	Hasil	Fasilitasi rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang	100%	85,25%

### **13. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat keterangan asal)**

#### **30. Sub Keg Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 58.397.000,- terealisasi sebesar Rp.41.113.000,- atau 70.40% digunakan untuk koordinasi dan layanan penerbitan SKA. Hasil yang dicapai/out come kegiatan

yaitu jumlah koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA sebanyak 8 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.1.30**

Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	58.397.000	41.113.000
2	Keluaran	jumlah koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA	8 kl	7 kl
3	Hasil	Terbitnya data layanan penerbitan SKA	100%	70,40%

## **8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

### **13. Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.**

#### **31. Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.824,100.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.788.146.767,- atau 98,03 % digunakan untuk sarana distribusi perdagangan . hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan sebanyak 5 paket selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.31**

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	1.824,100.000,-	1.788.146.767,-
2	Keluaran	jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan	5 kl	5 kl
3	Hasil	Peningkatan ekonomi masyarakat	100%	98.03%

#### **32. Sub Keg. Fasilitas pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 266.975.000,- terealisasi sebesar Rp. 242.815.971,- atau 90.95% digunakan untuk peningkatan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah fasilitas pengelolaan sarana

distribusi perdagangan sebanyak 48 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.32**  
Fasilitasi pengelolaan Sarana distribusi perdagangan

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	266.975.000	242.815.971
2	Keluaran	jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	48 kl	45 kl
3	Hasil	Peningkatan perekonomian masyarakat	100%	90,95

**14. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.**

**33. Sub Keg. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 80.000.000,- atau 100% digunakan untuk pembinaan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah pembinaan, penertiban dan penataan sarana perdagangan sebanyak 50 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.33**  
Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Sarana distribusi perdagangan

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	80.000.000	80.000.000
2	Keluaran	Jumlah pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana distribusi perdagangan	50 kl	50 kl
3	Hasil	Tertib pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	100%

**9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

**15. Kegiatan Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota.**

**34.Sub Keg. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 323.824.300,- terealisasi sebesar Rp. 177.151.800,- atau 54.71% digunakan untuk peningkatan informasi daftar harga kebutuhan pokok barang penting. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat sebanyak 96 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.1.34**

Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	323.824.300	177.151.800,-
2	Keluaran	jumlah Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan	96 kl	96 kl
3	Hasil	Tersedianya data daftar harga kebutuhan barang pokok masyarakat	100%	54,71 %

**10. Program STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**16. Kegiatan Pelaksanaan metrology legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan**

**35. Sub Keg.Pelaksanaan metrology legal, berupa tera,tera ulang.**Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 228.682.500,- terealisasi sebesar Rp. 155.246.646.- atau 67,89% digunakan untuk peningkatan pelaksanaan tera,tera ulang semua peralatan ukur,takar timbang dan perlengkapannya.hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah Pelaksanaan metrology legal berpa tera,tera ulang sebanyak 1000 bh selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.35**

Pelaksanaan metrology legal, berupa tera,tera ulang.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	228.682,500	155.246.646
2	Keluaran	jumlah Pelaksanaan metrology legal berpa tera,tera ulang	1 kl	0.72 kl
3	Hasil	Terjaminnya kualitas alat ukur,takar timbang dan perlengkapannya bertanda sah	100%	67,89%

**36. Sub Keg.Pengawasan/penyuluhan metrology legal.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 85.000.000,- terealisasi sebesar Rp.83.000.000,- atau 97,65% digunakan untuk peningkatan pengawasan dan penyuluhan alat ukur takar timbang metrology legal. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah pengawasan/penyuluhan metrology legal sebanyak 12 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 2.1.36****Pengawasan/penyuluhan metrology legal**

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	85.000.000	83.000.000
2	Keluaran	jumlah pengawasan/penyuluhan metrology legal	12 kl	12 kl
3	Hasil	Tertib peralatan ukur,takar,timbang dan perlengkapannya	100%	97,65%

**37. Sub Keg.Penyidikan metrology legal.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 65.502.400,- terealisasi sebesar Rp. 55.853.221,- atau 85,27% digunakan untuk peningkatan peralatan ukur,takar timbang dan perlengkapannya. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah penyidikan metrology legal sbanyak 1000 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.37****Penyidikan metrology legal.**

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	65.502.400	55.853,221
2	Keluaran	jumlah penyidikan metrology legal	1000 bh	954 bh
3	Hasil	Tertib alat ukur dan konsumen cerdas	100%	95,40%

## **10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri**

### **17.Kegiatan Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan pembangunan.**

#### **38.Sub Keg. Peningkatan system dan jaringan inpormasi perdagangan.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.826.000,- atau 89,95% digunakan untuk peningkatan promosi ,pemasaran dan pembangunan industri. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah peningkatkan system dan jaringan inpormasi perdagangan sebanyak 30 kali selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.38**  
**Peningkatan system dan jaringan inpormasi perdagangan.**

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	50.000.000	44.826.000.-
2	Keluaran	Jumlah peningkatan system dan jaringan inpormasi perdagangan	30 kl	27 kl
3	Hasil	Tersedianya data dan inpormasi pembangunan industri	100%	89,95%

## **11. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

### **18.Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.**

#### **39.Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000,- terealisasi sebesar Rp.119.893.322.- atau 99,91% digunakan untuk peningkatan kordinasi,sinkronisasi pembangunan sumber daya industri. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sumber daya industri sebanyak 3 Ikm/klp selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.39**

Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	120.000.000	119.893.322.-
2	Keluaran	jumlah koordinasi,sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	3 ikm/klp	3 ikm/klp
3	Hasil	Trampil dalam pengelolaan desain teknologi	100%	99.91 %

#### **40.Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.651.500.000,- terealisasi sebesar Rp.932.325.547.- atau 56,45% digunakan untuk peningkatan koordinasi,sinkronisasi pembangunan sarana prasarana industri. hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri sebanyak 22 klp/IKM selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel 2.35 di bawah ini :

**Tabel 2.1.40**

Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	1.651.500.000	932.325.547.-
2	Keluaran	jumlah koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	22 ikm/klp	16 ikm/klp
3	Hasil	Tersedianya sarana pembangunan industri	100%	56,45%

#### **41.Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 240.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 239.500.494,- atau 99,79% digunakan untuk peningkatan pemberdayaan industri didukung peran serta masyarakat. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah koordinasi, sinkronisasi pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat sebanyak 7 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.41**

Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	240.000.000	239.500.494
2	Keluaran	jumlah koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	7 kl	7 kl
3	Hasil	Keikutsertaan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan industri	100%	99,79%

## 12. Program Pengendalian izin usaha industri

**19. Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin usaha perluasan industri (IUPI), Izin usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI), kewenangan kab/Kota berbasis sistem informasi industri.**

**42. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/Kota berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100% digunakan untuk koordinasi sinkronisasi penerbitan dan perluasan kawasan industri. Hasil yang dicapai/output kegiatan yaitu jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/Kota berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS) sebanyak 2 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1.42**

Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/Kota berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	15.000.000	15.000.000
2	Keluaran	jumlah Fasilitas pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS)	2 kl	2 kl
3	Hasil	Tersedianya dokumen data analisis dan kawasan industri melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS)	100%	100%



### **13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

#### **20. Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUT, IUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota.**

#### **43. Kegiatan Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas).**

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 88.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 85.872.100.- atau 97,58% digunakan untuk peningkatan fasilitasi dan analisis data industri. Hasil yang dicapai/out come kegiatan yaitu jumlah Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas sebanyak 1 kl selama 12 bulan. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1.43**

Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas).

No	Narasi	Tolak ukur	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Masukan	Dana	88.000.000	85.872.100.-
2	Keluaran	jumlah Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas	1 kl	1 kl
3	Hasil	Tersedianya dokumen data analisis dan kawasan industri melalui sistem informasi industri nasional (SIINas	100%	100%

Program dan kegiatan  
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun  
Anggaran 2022 dapat dilihat pada table berikut ini:

No	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Presentasi		Ket
					K	Rp	
I	<b>Prog Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*)</b>	11.234.959.662	10.302.813.069	98,80	91,70	
1	<b>Keg.Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP*)</b>	365.351.500	360.489.058	100	98,70	
1	Sub Keg.Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	229.085.000	244.810.058	100	98,13	
2	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD	138.146.500	135.679.000	100	99,66	
2	<b>Keg. Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*)</b>	8.810.420.892	8.008.193.133	100	90,89	
3	Sub Keg.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan	6.939.008.692	6.175.300.933	100	88,99	
4	Sub Keg.Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah pengelolaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1.378.327.200	1.368.727.200	100	99,30	
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan skpd yang tersusun	488.585.000	459.665.000	100	94,08	
5	Sub Keg.Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun or	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	3.500.000	3.500.000	100	100	
6	Sub Keg. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1.000.000	1.000.000	100	100	
4	<b>Keg. Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*)</b>	1.103.038.200	1.051.005.353	100	95,28	
8	Sub Keg.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponene instalasi listrik/penerangan bangunan	29.950.000	29.949.900	100	100	
9	Sub Keg.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33.278.200	33.273.800	100	99,99	
10	Sub Keg.Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	489.272.000	448.818609	100	91,73	
11	Sub Keg.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan enggandaan	35.000.000	32,100.100	100	91,71	
12	Sub Keg.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan	7.500.000	7,500.000	100	100	
13	Sub Keg.Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	42.050.000	41.965.000	100	99,80	
14	Sub Keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi keluar daerah dan dalam daerah	465.988.000	461.577.544	100	99,05	
5	<b>Keg. Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu*)</b>	135.292.070	127.727.700	100	94,41	
15	Sub Keg.Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kantoryang diadakan	135.292.070	127.727.700	100	94,41	
6	<b>Keg.Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	596.600.000	540.239.004	100	90,55	
16	Sub Keg.Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat	15.000.000	15.000.000	100	100	
17	Sub Keg.Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	401.000.000	346.239.004	100	86,09	
18	Sub Keg.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	180.600.000	180.000.000	100	99,67	
7	<b>Keg. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *)</b>	224.377.000	215.158.821	100	95,89	

19	Sub Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasi opnal atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas /operasional	153.977.000	145.649.755	100	94,59	
20	Sub Keg. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	70.400.000	69.509.066	100	98,73	
II	<b>Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah</b>		4.226.850.000	1.994.872.547	56,17	47,20	
	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT</b>	215.600.000	214.895.600	100	99,67	
8	<b>Keg. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	215.600.000	214.895.600	100	99,67	
22	Sub Keg. Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota.	Jumlah pengawasan revitalisasi dan fasilitasi RAT	130.000.000	129.594.000	100	99,69	
22	Sub Keg. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kab/kota.	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kab/kota	85.600.000	85.301.000	100	99,65	
IV	<b>Program Pendidikan dan Latihan perkoperasian</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian</b>	300.400.000	294.650.700	100	98,09	
11	<b>Keg. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota.</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian</b>	3300.400.000	294.650.700	100	98,09	
25	Sub Keg. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kopetensi SDM koperasi..	Jumlah bintek pengembangan <b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</b> SDM koperasi dan jlh pelaksanaan sosialisasi perkoperasian	300.400.000	294.650.700	100	98,09	
V	<b>Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi</b>	<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</b>	90.000.000	89.890.000	100	99,88	
13	<b>Keg. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten /kota.</b>	<b>Persentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah</b>	90.000.000	89.890.000	100	99,88	
27	Sub Keg. Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rekstrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi kemitraan dan sarana usaha monitoring dan evaluasi koperasi koperasi penerima dana bantuan rapat evaluasi NRB	90.000.000	89.890.000	100	99,88	
VI	<b>Program pemberdayaan usaha menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>	3.210.790.000	1.000.892.500	41,19	3,17	
14	<b>Keg. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	3.210.790.000	1.000.892.500	41,19	3,17	
28	Sub Keg. pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro.	Jumlah fasilitasi sarana produksi UMK	2.850.390.000	644.493.500	33,75	22,61	
29	Sub Keg. Pasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.	Jumlah usaha mikro kecil yang memiliki legalitas usaha	160.000.000,	157.299.000	100	98,31	
30	Sub keg. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.	Jumlah usaha mikro kecil yang memiliki legalitas usaha	200.400.000	199.100.000	100	99,35	
VII	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan</b>	410.060.000	394.543.747	98,44	96,22	

15	Keg. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha mikro	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	410.060.000	394.543.747	98,44	96,22	
31	Kegiatan Fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, serta desain dan teknologi.	Jumlah UMK yang didukung pengetahuan dan teknologi dan jumlah promosi produk UMKM	410.060.000	394.543.747	98,44	96,22	
	<b>URUSAN PERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>		3.082.481.200	2.752.400.905	84,72	89,32	
VIII	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>	158.397.000	126.360.500	84,70	79,71	
	Penerbitan tanda daftar perusahaan	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100.000.000	85.247.500	85,53	85,25	
	Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang	100.000.000	85.247.500	85,53	85,25	
16	Keg. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat keterangan asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	58.397.000	41.113.000	83,13	70,40	
32	Sub Keg. Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA.		58,397.000	41.113.000	83,13	70,40	
IX	<b>Program Peningkatan Sarana distribusi perdagangan</b>	<b>Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	2.171.075.000	2.110.962.738	99,23	97,23	
17	Sub Keg. Pembangunan dan pengelolaan Sarana distribusi perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.091.075.000	2.030.962.738	99,20	97,13	
33	Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.	Jumlah pasar yang dibangun dan jlh pemeliharaan bangunan pasar	1.824.100.000	1.788.146.767	100	98,03	
34	Sub Keg. Fasilitas pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.	Jumlah pemeliharaan saluran air, jumat bersih, taman, pengawasan kebersihan pasar dan tim kebersihan adipura	266.975.000	242.815971	93,75	90,95	
18	<b>Program Pembinaan terhadap Pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.</b>	<b>Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	80.000.000	80.000.000	100	100	
35	Sub Keg. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.	Jumlah penataan/penertiban tempat usaha pedagang	80.000.000,-	80.000.000	100	100	
X	<b>Program Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting</b>	<b>Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok</b>	323.824.300	177.151.800	100	54,71	
19	Keg. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota.	Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	323.824.300	177.151.800	100	54,71	
36	Sub Keg. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan.	Jumlah informasi dan data kebutuhan harga bahan pokok penting pasar rakyat	323.824.300	177.151.800	100	54,71	
XI	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Barang/Jasa yang beredar</b>	379.184.900	294.099.867	81,37	77,56	
20	Program Pelaksanaan metrology legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	379.184.900	294.099.867	81,37	77,56	
37	Sub Keg. Pelaksanaan metrology legal, berupa tera, tera ulang.	Jumlah peningkatan SDM dan terciptanya sarana/prasarana operasional kemeterologian	228.982.500	155.246.646	72,00	67,89	

38	Sub Keg. Pengawasan/penyuluhan metrology legal.	Jumlah jaminan kebenaran hasil pengukuran dan kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi keluar daerah dan terlindunginya konsumen dan terawasinya barang 12 kl beredar dan jumlah peningkatan SDM dan terciptanya sarana /prasarana operasional kemetrolgian	85.000.000,-	83.000.000	100	97,65	
39	Sub Keg. Penyidikan metrology legal.	Juml;ah terciptanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dan jumlah potensi alat UTTP	65.,502.400	55.853.221	89,90	86,27	
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Presentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>	<b>50.000.000</b>	44.826.000	90.00	89,65	
	Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase Pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	50.000.000	44.826.000	90.00	89,65	
	Peningkatan system dan jaringan inpmormasi perdagangan	Peningkatan system dan inpmormasi jaringan perdagangan	50.000.000	44.826.000	90.00	89,65	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>		2.114.500.000	1.392.591.463.	102,88	65,86	
XII	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>Persentase Pertumbuhan IKM</b>	2.011.500.000	1.291.719.363	78.73	64.22	
21	<b>Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.</b>	<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>	2.011.500.000	1.291.719.363	78.73	64.22	
41	Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri.	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	120.000.000	119.893.322	100	99,91	
42	Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri.	Jumlah Pengembangan inovasi produksi IKM/sarana dan prasarana industri	1.651.500.000	932.325.547	74.09	56,45	
43	Sub keg. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	jumlahPembinaan keterampilan pengrajin promosi dan raker	240.000.000	239.500.494	100	99,79	
	<b>Program pengendalian izin usaha industri</b>	<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industry(IUI) besar yang</b>	15.000.000	15.000.000	100	100	
	<b>Penerbitan izin usaha industry(IUI) izin perluasan usaha industry(IPUI) izin usaha kawasan industry (IUKI) dan izin perluasan kawasan industry(IPKI) kewenangan kan/kota berbasis system inpmormasi industri</b>	<b>Jumlah penerbitan izin usaha industry(IUI) izin perluasan industry(IPUI) izin usaha kawasan industry (IUKI) dan izin perluassan kawasan industry(IPKI)</b>	15.000.000	15.000.000	100	100	
	<b>Koordinasi dan sinkronisasi dibidang industry dalam lingkup IUI,IUPi,IUKI,IPKI kewenangan kab/Kota berbsisi system inpmormasi industry nasional(SIINAS)</b>	<b>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industry dalam lingkup IUI,IUPi,IUKI,IPKI kewenangan kab/Kota berbsisi system inpmormasi industry nasional</b>	15.000.000	15.000.000	100	100	
XIII	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INPORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase penyediaan system inpmormasi data industry secara lengkap dan terkini</b>	88.000.000	85.872.100	100	97,58	
	<b>Penyediaan inpmormasi industri untuk inpmormasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota.</b>	<b>Persentase perusahaan Industri dan perusahaan kawasan industry lintas kab/Kota yang masuk dalam SII NAS</b>	88.000.000	85.872.100	100	97,58	

44	Sub Keg. Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sitem informasi industri nasional (SIINas).	Jumlah data koordinasi dan sinkronisasi	88.000.000	85.872.100	100	97,58	
<b>Jumlah</b>			<b>20.658.790.862</b>	<b>16.447.857.584</b>	<b>88,21</b>	<b>79,52</b>	

#### 44. Kebijakan Strategis yang dilaksanakan

Kebijakan Strategi disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang selaras dengan rencana program dan kegiatan prioritas. Dalam rancangan awal Strategi yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperindag mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi Dinas Koperindag Kabupaten Kotabaru dalam rangka mencapai visi, misi pemerintah daerah, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

Strategis	Arah kebijakan
Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM	Peningkatan akses teknologi, kualitas produk permodalan dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM
Mengembangkan industry dan perdagangan	Peningkatan volume dan nilai industry dan perdagangan
Meningkatkan kualitas SDM bagi para pelaku IKM, koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan bagi para Pembina, pelaku IKM, koperasi dan UMKM</li> <li>2. Menumbuhkembangkan wirausaha baru sebagai salah satu factor penggerak perekonomian daerah</li> </ol>
Meningkatkan peranan koperasi dan UMKM, industry dan perdagangan sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk-produk UMKM dan Koperasi</li> <li>2. Meningkatkan akses permodalan dan pemasaran produk-produk UMKM dan Koperasi</li> </ol>
Mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh dengan menjadikan industry rakyat sebagai motor penggerak dan industry perdagangan dan jasa sebagai pendukung.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan industry berbasis sumber daya terutama pertanian, perikanan perkebunan</li> <li>2. Membangun klaster industry sesuai dengan potensi unggulan daerah masing-masing</li> <li>3. Mengembangkan sector perdagangan dan jasa sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat</li> <li>4. Melakukan menataan / pengawasan perdagangan</li> </ol>

### 2.2.1. Indikator kinerja kunci keluaran (Output)

#### Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru

No	Urusan Pemerintahan	Indikator kinerja kunci keluaran		Capaian kinerja	Sumber data	ket
1	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.1	Persentase penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{12}{19} \times 100\%$ = 63,15%	Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan Kab Kotabaru	
		1.2	Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembentukan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{6}{10} \times 100\%$ = 60%		
		1.3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{70}{110} \times 100\%$ = 63,64%		
		1.4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{13}{19} \times 100\%$ = 68,42%		
		1.5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{66}{110} \times 100\%$ = 60%	Blm ada data	
		1.6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{191}{110} \times 100\%$ = 173,64%	Blm ada data	
		1.7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{2}{110} \times 100\%$ = 1,79%		
		1.8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	$\frac{35}{110} \times 100\%$ = 31,25%		
		1.9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikasi nomor induk koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{31}{110} \times 100\%$ = 27,68%		
		1.10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{35}{110} \times 100\%$ = 33,33%		
		1.11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0		Tidak ada data

		1.12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{51 \times 100\%}{108}$ =47.22%		
		1.13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{32 \times 100\%}{110}$ =29,09%		
	UMKM	2.1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{106 \times 100\%}{8.738}$ = 1,21%		
		2.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam system online data system (ODS)	0		Tidak ada data
		2.3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{2 \times 100\%}{106}$ = 1,89%		
		2.4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{6 \times 100\%}{106}$ = 5,66%		
		2.5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{40 \times 100\%}{106}$ = 37,74%		
		2.6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan pelatihan	$\frac{154 \times 100\%}{106}$ = 145,28%		
		2.7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	$\frac{106 \times 100\%}{8.738}$ = 1,21%		
2	Perdagangan	1.1	Persentase peijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin untuk : a. Pusat perbelanjaan	0		Tidak ada data bukan tupoksi dinas
			b. toko swalayan	0		Tidak ada data bukan tupoksi dinas
		1.2	Persentase penerbitan TDG	2 gudang		
		1.3	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0		Tidak ada data bukan tupoksi dinas
		1.4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk ; a).penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b). penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c.). penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0		Tidak ada data bukan tupoksi dinas
		1.5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi ,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota	0		Tidak ada data bukan tupoksi dinas
		1.6	persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{170 \times 100\%}{1.080}$ = 15,74%		
		1.7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	$\frac{4 \times 100\%}{65}$		



			diwilayah kerjanya	=6,15%		
		1.8	Persentase koopesein variasi harga antar waktu	$\frac{96 \times 100\%}{96}$ = 100%		1 bln 8 kl x 12 bl
		2.1	Jumlah pupuk dan pestisida yang disalurkan	$\frac{8.142 \times 100\%}{8.088,3}$ = 99,34%		
		3.1	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{960 \times 100\%}{48.847}$ =1.97%		
		3.2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0		Tidak ada data
3	Perindustrian	1.1	persentase jumlah penetapan ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri(IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0		Tidak ada data karena bukan tupoksi
		2.1	persentase terselesaikannya dukomen RPIK sampai dengan ditetapkan sebagai PERDA	$\frac{15 \times 100\%}{15}$ = 100%		
		3.1	Persentase jumlah ijin yang diterbitkan usaha industri(IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{6 \times 100\%}{229}$ = 2,62%		
		4.1	persentase jumlah ijin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{11 \times 100\%}{101}$ = 10,89%		
		5.1	persentase data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINAS terhadap populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota	$\frac{51 \times 100\%}{108}$ = 47,22% x		

### 2.2.2. Indikator kinerja kunci hasil (OUTCOME)

No	Urusan Pemerintahan	indicator kinerja kunci hasil		capaian kinerja	sumber data	ket
1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1	meningkatnya koperasi yang berkualitas	$\frac{30 \times 100\%}{110}$ = 27,27 %	Bid Koperasi	
		2	Meingkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{106 \times 100\%}{8.738}$ = 1,21 %	Bid UKM	
2	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTMNUTS/SIUP toko swalayan)	$\frac{1.750 \times 100\%}{1.786}$ = 97,98 %	Bid Perdagangan	
		2	persentase kinerja pupuk	$\frac{8.142 \text{ ton} \times 100\%}{8.088,3 \text{ ton}}$ = 99,34%	Bid Kemetrolagian	
		3	persentase alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	$\frac{960 \times 100\%}{48.847}$ = 1,97%	Bid Kemetrolagian	
3	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten /kota	$\frac{15 \times 100\%}{101}$ = 14,85%	Bid perindustrian	
		2	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	$\frac{15 \times 100\%}{15}$ = 100 %		
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) keci dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{31 \times 100\%}{101}$ = 30,69 %		
		4	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		Tidak ada data
		5	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUIKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota	0		Tidak ada data
		6	tersedianya inpormasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri 0-6 bulan dan 7-12 bulan serta kelengkapan informasi industri = 95%		

## 2.5. CAPAIAN KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

## 2.6. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

### 2.6.1 Target kinerja dan perjanjian Kinerja

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kotabaru melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022. Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan Anggaran. Perjanjian kinerja dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel**  
**Target Kinerja dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2022**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target thn 2022	Program		Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Meningkatnya tata kelola koperasi	-persentasi koperasi aktif	66,67%	1	Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	11.234.959.662
		-Presentasi koperasi berkualitas	0.0%					
	Meningkatnya usaha mikro	-Persentasi usaha mikro menjadi usaha kecil	24.44 %	2	Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	<b>Persentasi Koperasi yang melaksanakan RAT</b>	36,36%	215.000.000
	Meningkatnya pembinaan industry pengolahan berbasis produk local	-Persentasi industry kecil dengan produk yang memnuhi standard mutu	55 %	3	Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian</b>	47,62%	300,400.000
	Meningkatnya pelayanan kemetrolagian dan tera	Cakupan alat ukur timbangan dan perlengkapannya yang dilakukan tera/tera ulang	40%	4	Perberdayaan dan perlindungan koperasi	<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan</b>	57,14 %	90.000.000
	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perdagangan dan ketersediaan barang pokok dan penting	-Persentasi sarana dan prasarana pasar yang dikelola dengan baik	40%	5	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>	40 %	1.454.970.200
		-persentasi sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	23,08%	6	Pengembangan UMKM	<b>Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan</b>	40 %	3.210.790.000.

		-Cakupan ketersediaan informasi harga pokok dan penting	100%	7	Perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase penerbitan ijin perusahaan	83,33 %	158.397.400
				8	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	<b>Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	46,15 %	2.171.075.000.
				9	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<b>Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok</b>	100 %	323.824.300
				10	Standarisasi dan perlindungan konsumen	<b>Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	40 %	379.184.900
				11	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100%	50.000.000.
					Perencanaan dan Pembangunan industri	<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>	40 %	2.011.500.000
				12	Pengendalian ijin usaha industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) yang dikeluarkan instansi terkait	4,39%	15.000.000.
				13	Pengelolaan system informasi industri nasional	<b>Persentase Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini</b>	76 %	88.000.000

### 2.6.2. Pengukuran capaian kinerja dibanding dengan target perjanjian kinerja.

No	Sasaran strategis	Indicator kinerja	Target	Realisasi thn 2021	Ket
	Meningkatnya tata kelola koperasi	persentasi koperasi aktif	66,67 %	42,5 %	
		Presentasi koperasi berkualitas	0.0%	0 %	
	Meningkatnya usaha mikro	Persentasi usaha mikro menjadi usaha kecil	24,44 %	4,9 %	
	Meningkatnya pembinaan industry pengolahan berbasis produk lokal	Persentasi industry kecil dengan produk yang memnuhi standard mutu	55 %	11,53 %	
	Meningkatnya pelayanan kemetrolagian dan tera	Cakupan alat ukur timbangan dan perlengkapannya yang dilakukan tera/tera ulang	40%	1,29 %	
	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perdagangan dan ketersediaan barang pokok dan penting	Persentasi sarana dan prasarana pasar yang dikelola dengan baik	40%	30,77 %	
		persentasi sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	23,08%	10,77 %	
		Cakupan ketersediaan inpormasi harga pokok dan penting	100%	100 %	

### 2.6.3. Pengukuran capaian kinerja dibanding dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran strategis	Indicator kinerja	Target	Realisasi thn 2021	Perbandingan thn 2021realisasi
1	Meningkatnya tata kelola koperasi	persentasi koperasi aktif	66,67 %		42,5 %
		Presentasi koperasi berkualitas	0.0%	0%	0 %
	Meningkatnya usaha mikro	Persentasi usaha mikro menjadi usaha kecil	24,44 %		4,9 %
	Meningkatnya pembinaan industry pengolahan berbasis produk lokal	Persentasi industry kecil dengan produk yang memnuhi standard mutu	55 %		11,53 %
	Meningkatnya pelayanan kemetrolagian dan tera	Cakupan alat ukur timbangan dan perlengkapannya yang dilakukan tera/tera ulang	40%		1,29 %
	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perdagangan dan ketersediaan barang pokok dan penting	Persentasi sarana dan prasarana pasar yang dikelola dengan baik	40%		30,77 %
		persentasi sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	23,08%		10,77 %
		Cakupan ketersediaan inpormasi harga pokok dan penting	100%	100 %	100 %

#### 2.6.4 Pengukuran Capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah.

No.	Indikator Kinerja Utama/Sasaran	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian Realisasi s/d 2020 terhadap RPJMD Tahun 2021 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
1.	Persentase Koperasi Aktif	66,67 %	42,5 %	0,96	66,39%	8,96
2.	Persentase Koperasi Berkualitas	0.0%	0 %	0	5,00%	0
3.	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	24,44 %	4,9 %	0.10	22,22%	22,22
4.	Persentasi industry kecil dengan produk yang memnuhi standard mutu	55 %	11,53 %	0.17	100%	263,16
5	Cakupan alat ukur timbangan dan perlengkapannya yang dilakukan tera/tera ulang	40%	1,29 %	0.06	5,11%	25,55
6	Persentasi sarana dan prasarana pasar yang dikelola dengan baik	40%	30,77 %	0.75	5,79%	28,95
7	persentasi sarana dan prasarana perdagangan yang direvitalisasi	23,08	10,77 %	0.14	4,34%	0
8	Cakupan ketersediaan inpormasi harga pokok dan penting	100%	100 %	1.0	80%	80

Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian

#### 2.6.5 Analisis efesiensi pengguna sumber daya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai

Sumber daya dalam suatu kegiatan akan berpengaruh terhadap penggunaan anggaran. Semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Inovasi dalam pengelolaan sumber daya manusia pada lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan regenerasi SDM pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kotabaru, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tupoksi.
2. Tingkat pendidikan dasar yang paling utama dalam menyusun dan penugasan aparatur dalam mengemban jabatan yang diberikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Hal ini terlihat bahwa tingkat pencapaian kinerja dan anggaran walaupun adanya pandemic COVID-19. Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2022 sasaran strategis dapat tercapai dengan baik walaupun hingga saat ini pandemic masih berlangsung. Ada beberapa sasaran strategis yang targetnya sangat kurang, yaitu;

1. Meningkatnya tata kelola koperasi dalam mewujudkan koperasi yang aktif ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 54,73% terjadi penurunan 1,16% dari pencapaian sebesar 53,57% akibat pandemi COVID-19. Sehingga terbatas/terhambatnya pergerakan koperasi. Untuk koperasi yang berkualitas ditargetkan sebesar 5 % karena tidak adanya kegiatan.
2. Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil ditargetkan sebesar 47,50 % dengan kondisi pandemi covid -19 kegiatan usaha kecil tidak dapat tumbuh dengan baik dan tidak dapat memenuhi pencapaian target
3. Meningkatnya pembinaan industri pengolahan berbasis produk local ditarget pada tahun 2021 sebesar 68% dan telah terjadi penurunan dari pencapaian target karena terbatasnya pengembangan pengolahan
4. Meningkatnya pelayanan kemetrirologian dan tera pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 20 % dari jumlah seluruh UTTP terjadi penurunan dari pencapaian target hal ini disebabkan terbatas ruang gerak petugas akibat pandemi covid-19 di berbagai sector, kurangnya pengguna UTTP untuk melakukan tera/tera ulang.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana pasar ditahun 2021 ditargetkan sebesar 40 % dianggarkan melalui APBD akibat terjadinya pandemic

covid-19 maka dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. sedangkan anggaran dari APBD untuk revitalisasi terus ditingkatkan sekalipun turun dari target yang telah ditetapkan sebesar 77,8% sedangkan untuk informasi harga bahan pokok dan penting ditargetkan sebesar 100% dalam pendataan harga kebutuhan pokok penting dan resiko penularan covid-19 tidak terabaikan.

#### 2.6.6. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target Kinerja

No	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Presentasi		Ket
					K	Rp	
1	<b>Program pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentasi Koperasi yang melaksanakan RAT</b>	<b>215.000.000</b>	<b>214.895.600</b>	<b>100</b>	<b>99,67</b>	
	<b>Keg,</b> Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,,koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keangitaanya dalam daerah kabupaten/Kota	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi,,koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keangitaanya dalam daerah kabupaten/Kota	<b>215.000.000</b>	<b>214.895.600</b>	<b>100</b>	<b>99,67</b>	
	<b>Sub Keg,</b> Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota.	Jumlah Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota.	130.000.000	129.594.000	100	99,69	
	<b>Sub Keg,</b> Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah rakorda,rakornas ,harkopnas koordinasi dan konsultasi program,koperasi berprestasi dan penyuluhan perkoperasian	85,600.000	85,301.600	75,00	99,65	
2	<b>Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian.</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian</b>	<b>300.400.000</b>	<b>294650.700</b>	<b>100</b>	<b>98,09</b>	
	<b>Keg,</b> Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/KOTA	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	<b>300.400.000</b>	<b>294650.700</b>	<b>100</b>	<b>98,09</b>	
	<b>Sub Keg</b> Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kopetensi SDM koperasi..	Jumlah Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kopetensi SDM koperasi	300.400.000	294650.700	100	98,09	
	<b>Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi.</b>	<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan pembiayaan</b>	<b>. . 90.000.000</b>	<b>89,890.000</b>	<b>100</b>	<b>99,98</b>	



	<b>Keg.</b> Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan oleh pemerintah daerah	. . 90.000.000	89,890.000	100	99,98	
25	<b>Sub Keg.</b> Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rekstukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Pemberdayaan peningkatan produktivitas nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan rekstukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	. . 90.000.000	89,890.000	100	99,98	
	<b>Program pemberdayaan usaha menengah usaha kecil an usaha mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>	<b>3.210.790.000</b>	<b>1.000.892.500</b>	<b>41,19</b>	<b>41,19</b>	
	<b>Keg.</b> Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Peresentase Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan, perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	<b>3.210.790.000</b>	<b>1.000.892.500</b>	<b>41,19</b>	<b>41,19</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro.	Jumlah pendataan potensi pengembangan usaha mikro	2.850.390.000	644.495.500	33,75	22,61	
	<b>Sub Kegiatan</b> Pasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.	Jumlah fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	160.000.000,	157.299.000	100	98,31	
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro .	Jumlah Peremberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro .	200.400.000	199.100.000	100	99,35	
29	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase Usaha mikro yang mendapatkan pembinaan</b>	<b>410.060.000</b>	<b>394.543.747</b>	<b>98,44</b>	<b>96,22</b>	
	<b>Keg.</b> Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Peresentasi usaha mikra yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	<b>410.060.000</b>	<b>394.543.747</b>	<b>98,44</b>	<b>96,22</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, serta desain dan teknologi.	Jumlah fasilitasi uasaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, serta desain dan teknologi	410.060.000	394.543.747	98,44	96,33	
30	<b>Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan</b>	<b>Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</b>	<b>158.397.000</b>	<b>126.360.500</b>	<b>84,70</b>	<b>79,77</b>	
	<b>Keg.</b> Penerbitan tanda daftar gudang	Persentase rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang	<b>100.000.000</b>	<b>85.247.500</b>	<b>85,63</b>	<b>85,25</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi penerbitan tanda daftar guang	Jumlah rejomendasi penerbitan tand aftar gudang	100.000.000	85.247.500	85,63	85,25	

31	<b>Kegiatan</b> , Penerbitan Surat Keterangan Asal(bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat keterangan asal)	Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	<b>58,397.000</b>	<b>41.113.000</b>	<b>83,13</b>	<b>70,40</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> , Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA.	Jumlah Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional	58,397.000	41.113.000	83,13	70,40	
	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan</b>	<b>Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>2.672.756.902</b>	<b>2.645.688.902</b>	<b>100</b>	<b>99,89</b>	
32	<b>Kegiatan</b> Pembangunan dan pengelolaan Sarana distribusi perdagangan	Persentase pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	<b>2.672.756.902</b>	<b>2.645.688.902</b>	<b>100</b>	<b>99,89</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.	Jumlah pasar yang dibangun dan jlh pemeliharaan bangunan pasar	2.672.756.902	2.645.688.902	100	99,89	
	<b>Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>Persentase pembangunan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>2.171.075.000</b>	<b>2.110.962.738</b>	<b>99,23</b>	<b>97,23</b>	
33	<b>Kegiatan</b> Pembangunan dan pengelolaan Sarana distribusi perdagangan	Persentase pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<b>2.091.075.000</b>	<b>2.030.962.738</b>	<b>99,20</b>	<b>97,13</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan distribusi perdagangan	Jumlah penyediaan sarana distribusi perdagangan	1.824.100.000	1.788.146.757	100	98.03	
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitasi pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.	Jumlah pemeliharaan saluran air,jumat bersih,taman,pengawasan kebersihan pasar dan tim kebersihan adipura	266.975.000	242.815.971	93,75	90,95	
34	<b>Kegiatan</b> Pembinaan terhadap Pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya.	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<b>80.000.000,-</b>	<b>80.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Pembinaan dan pengendalian pengelolaan Sarana distribusi perdagangan.	Jumlah penataan/penertiban tempat usaha pedagang	80.000.000,-	80.000.000	100	100	
35	<b>Program Stailitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting .</b>	<b>Persentase stabilitas dan ketersediaan harga barang kebutuhan pokok</b>	<b>323.824.200</b>	<b>177.151.800</b>	<b>92,50</b>	<b>54,71</b>	
	<b>Kegiatan</b> Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten/kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten /kota	<b>323.824.200</b>	<b>177.151.800</b>	<b>92,50</b>	<b>54,71</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam system informasi perdagangan.	Jumlah informasi dan data kebutuhan harga bahan pokok penting pasar rakyat	323.824.200	177.151.800	92,50	54,71	
	<b>Program Standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	<b>Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen dan barang/jasa yang beredar</b>	<b>379.184.900</b>	<b>294.099.867</b>	<b>81,37</b>	<b>77,56</b>	
36	<b>Kegiatan</b> Pelaksanaan metrology legal ,berupa tera,tera ulang dan pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<b>379.184.900</b>	<b>294.099.867</b>	<b>81,37</b>	<b>77,56</b>	

	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang.	Jumlah pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang	228.682.500	155.246.646	72,00	67,89	
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengawasan/Penyuluhan metrology legal	Jumlah pengawasan/penyuluhan metrology legal	85.000.000	83.000.000	100	97,65	
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyidikan metrology legal	Jumlah penyidikan/penyuluhan metrology legal	65,502.400	55.853.221	89,90	85,27	
37	<b>Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>	<b>Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>	<b>50.000.000</b>	<b>44.826.000</b>	<b>90,00</b>	<b>89,65</b>	
	<b>Kegiatan</b> pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan perdagangan	<b>Kegiatan</b> pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan perdagangan	<b>50.000.000</b>	<b>44.826.000</b>	<b>90,00</b>	<b>89,65</b>	
	<b>Sub kegiatan</b> Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan	50.000.000	44.826.000	90,00	89,65	
39	<b>Program Perencanaan dan pembangunan industri.</b>	<b>Persentase Pertumbuhan IKM</b>	<b>2.011.500.000</b>	<b>1.291.719.363</b>	<b>78,73</b>	<b>64,22</b>	
	<b>Kegiatan</b> Penyusunan penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota.	Jumlah hasil penerapan RPIK yang ditetapkan jadi perda	<b>2.011.500.000</b>	<b>1.291.719.363</b>	<b>78,73</b>	<b>64,22</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri..	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	120.000.000	119.893.322	100	99,91	
40	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri..	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	1.65.500.000	932.325.547	74,09	56,45	
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Pembinaan keterampilan pengrajin promosi dan raker	240.000.000	239.500.494	100	99,79	
41	<b>Program pengendalian izin usaha industri</b>	<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Kegiatan</b> Penerbitan ijin usaha industry (IUI) Ijin perluasan usaha industry (IPUI) ijin usaha kawasan industry (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industry (IPKI) kewenangan kabupaten/kota berbasis system informasi industry nasional (SIINAS)	Jumlah penerbitan ijin usaha industry (IUI) ijin perluasan usaha industry (IPUI) ijin perluasan kawasan industry (IPKI) yang berbasis system informasi industry	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan di bidang industry dalam lingkup IUI<IPUI<IUKI<IPKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota berbasis system informasi industri nasional (SIINAS)	<b>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perijinan di bidang industry dalam lingkup IUI IPUI IUKI IPKI kewenangan kabupaten/kota berbasis system informasi industri nasional (SIINAS)</b>	15.000.000	15.000.000	100	100	
42	<b>Program pengelolaan system informasi industry nasional</b>	<b>Persentase Penyediaan Sistem informasi Data Industri secara lengkap dan terkini</b>	<b>88.000.000</b>	<b>85,872.100</b>	<b>100</b>	<b>97,58</b>	

43	<b>Kegiatan</b> Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUT, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota.	Persentase Sistem informasi Data Industri lintas kab/kota yang mauk dalam siiNassecara lengkap	88.000.000	85,872.100	100	97,58	
	<b>Sub Kegiatan</b> Fasilitas pengumpulan pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas).	Jumlah dokumen fasilitasi pengumpulan pengolahan data dan analisi data industry data kawasan industry serta data lain lingkup kab/kota lain lingkup kab/kota system informasi industry nasional SIINAS	88.000.000	85,872.100	100	97,58	

## 2.7. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun anggaran sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021 terhadap LKPJ 2020	Tindak lanjut
1	Back Up Pemerintah Daerah terhadap UMKM di kabupaten kotabaru agar benar-benar dapat sinkronisasi dengan program pusat maupun provinsi, terutama terkait dengan data UMKM yang ada di Kabupaten Kotabaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program bantuan pada UKM untuk pengadaan barang peralatan untuk mendukung usaha UMKM/pada kelompok masyarakat.</li> <li>2. Program bantuan kepada wirausaha pemula program dari kementerian koperasi dan UMKM.</li> <li>3. Pelatihan/penyuluhan keamanan pangan pada bulan april tahun 2021 dengan peserta 30 UMKM.</li> <li>4. Pada pebruari tahun 2022 akan dilaksanakan pelatihan/penyuluhan keamanan pangan dengan peserta 30 UMKM.</li> <li>5. Data mulai tahun 2006-2020 data 8.227 UMKM.</li> <li>6. Data UMKM pada tahun 2021 jumlah 7.680 UMKM terjadi pengurangan akibat pandemic covid-19.</li> <li>7. Pada tahun 2021 data UMKM yang divalidasi berjumlah 330 UMKM</li> <li>8. Berdasarkan surat kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan kabupaten Kotabaru Nomor .... Tanggal .... Tentang usulan bantuan produktif bagi usaha mikro dari program kementerian koperasi dan UMKM</li> </ol>
2	Masih belum tercapainya target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam hal penerimaan daerah(PAD) yang diakibatkan dampak pandemic covid-19 yaitu penurunan terhadap PAD dari tahun sebelumnya. Kami mengharapkan kepada Dinas Koperindag untuk mengotimalisasikan fasilitas metrology untuk peningkatan PAD dari sector perpajakan agar kiranya diputuskan secara jelas SKPD mana yang mempunyai tupoksi dalam hal ini melakukan kegiatan pungutan retribusi parkir dan untuk ditetapkan langganan parkir pertahun dengan pungutan dilakukan di samsat saat pembayaran pajak kendaraan tahunan ,dalam hal ini perlunya didasari oleh perda atau perbup dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan PAD yang dikelola Diskoperindag selalu peningkatan Target retribusi PAD pada Dinas Koperindag tahun 2020 Rp. 2.169.685.580.- Realisasi Rp. 2.259.827.606 (104.15%) atau lebih sebesar Rp. 90.142.046. Target retribusi PAD pada Dinas Koperindag tahun 2021 Rp. 2.386.405.560.- Realisasi Rp. 2.485.332.129 (103.9%) atau lebih 94.986.569.- Target retribusi PAD pada Dinas Koperindag tahun 2022 Rp. 2.426.405.560.- Untuk bidang metrology pada tahun 2021 belum beroperasi maksimal. Pada tahun</li> </ol>

	adanyaketegasan untuk mengaktifkan terhadap implementasi perda sarang burung wallet agar PAD kita lebih maksimal	<p>2022 akan beroperasi maksimal dengan mengaktifkan kantor UPT Unit Metrologi legal di setagen</p> <p>Pengelolaan retribusi parker dilingkungan paasr sesuai dengan perda nomor 2 tahun 2012 .dikelola oleh SKPD yang berasangkutan (DisKoperindag).</p> <p>Tarif untuk biaya tera ulang sudah diusulkan namun belum disetujui oleh DPRD</p> <p>Target retribusi PAD tahun 2022 pada bidang metrology sebesar Rp. 60.000.000</p>
3	Agar segera membangun/merehabilitasi total pasar ikan yang bocor untuk keselamatan penjual dan pembeli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan rehab melalui CSR Sime darby oil repeney pulau laut, rehab atap sebesar 50.000.000.-</li> <li>2. Melalui ABT tahun 2021 dana pokran sebesar Rp. 184.900.000.- rehab pasar ikan</li> <li>3. Usul rehab keseluruhan pada tahun 2023 melalui BPPW.</li> </ol>

### **BAB III**

#### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Tugas Desentralisasi dan Pembantuan yang merupakan system dan cerminan prosuder penugasan pemerintah kepada Daerah dan Desa serta penugasan dari daerah (provinsi atau kabupaten Kota) kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia serta melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada pemberi tugas. Pemberian tugas dana alokasi khusus dimaksud untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan penelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

Dana alokasi khusus/DAK yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota biasanya bersumber dana dari APBN Kementerian. Pada tahun 2022 di Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kotabaru menerima anggaran pembiayaan Non Fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

#### **a. Tugas Pembantuan Pusat/Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota**

##### **i. Target Kinerja**

Program dan Kegiatan melalui Dana Alokasi Khusus/DAK diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Melalui Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotabaru Tahun anggaran 2022 adalah Sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**

Program dan kegiatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	Instansi Pemberi Tugas	Jumlah Anggaran ( RP)
1	<b>Program</b> Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi	Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia	200.400.000.-
	<b>Kegiatan</b> Pendidikan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kab/kota		
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi		
2	<b>Program</b> Pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia	200.400.000.-
	<b>Kegiatan</b> Pemberdayaan usaha mikro yg dilakukan melalui pendataan, kemitraan kemudahan perizinan penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan		
	<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro		

## ii. Realisasi

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten kotabaru pada Tahun 2022 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus / DAK yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp.Rp 400.400.000.-dengan realisasi Rp.Rp 398.380.000,- atau 90.00%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.1.2**

**Realisasi Program dan Kegiatan melalui Dana Alokasi khusus/DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2022**

No	Bidang Urusan	Peraturan pelaksanaan	Program kegiatan output rincian kegiatan	Kab/Kota	KPDpelaks ana	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	%	Realisasi capaian kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bidang Koperasi	Kementeri an Koperasi dan UKM	<p><b>Program</b> Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi</p> <p><b>Kegiatan</b> Pendidikan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam daerah kab/kota</p> <p><b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi</p>	Kotabaru	Dinas Koperasi, perindustri an dan Perdagangan	200.400.000	197,960.000	98,78	Para pengurus koperasi mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian	100	
2	Bidang Usaha mikro	Kementeri an Koperasi dan UKM	<p><b>Program</b> Pemberdayaan usaha menengah ,usaha kecil dan usaha mikro</p> <p><b>Kegiatan</b> Pemberdayaan usaha mikro yg dilakukan melalui pendataan,ke mitraan kemudahan perizinan penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan</p> <p><b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro</p>	Kotabaru	Dinas Koperasi, perindustri an dan Perdagangan	200.400.000	200.400.000	100	Para wirausaha terampil memasarkan produk usahanya melalui online	100	
						400.400.000	398.360.000	99,39		100	



### **3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/kota**

#### **3.2.1. Target Kinerja**

- Tidak ada

#### **3.2.2. Realisasi**

- Tidak ada

### **3.3 Permasalahan dan Kendala**

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan melalui dana alokasi khusus/DAK non fisik tidak ada permasalahan yang berarti.

Kendala :

- a. SDM yang belum meratanya memiliki sertipikasi/diklat manajemen administrasi dan keuangan bagi pengurus maupun pengawas koperasi.
- b. Belum terampilnya dalam penggunaan media social sebagai media pemasaran produk olahan secara online.

## **1.4 Saran dan Tidak Lanjut**

### **➤ Saran**

Pengurus dan pengawas perlu memiliki sertifikasi keahlian dalam pengelolaan keuangan maupun administrasi lainnya sebelum berdirinya koperasi..

Para wirausaha dalam pemasaran produk olahan sebaiknya mempunyai desain baik itu rasanya juga kemasannya dan dapat menggunakan melalui media social secara online.

### **➤ Tindak lanjut**

Untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan baik pengurus maupun wirausaha harus dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkenaan dengan manajemen keuangan dan pemasaran produk olahan baik secara manual maupun online.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **4.1. Urusan Yang dilaksanakan**

##### **4.1.1. Jenis pelayanan Dasar**

- Tidak ada

##### **4.1.2. Target pencapaian SPM**

- Tidak ada

##### **4.1.3. Realisasi**

- Tidak ada

##### **4.1.4. Alokasi Anggaran**

- Tidak ada

##### **4.1.5. Dukumen Personil**

- Tidak ada

##### **4.1.6. Permasalahan dan Solusi**

- Tidak ada

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan ini diharapkan akan mendapat masukan yang berguna bagi perbaikan Kinerja dan Perkembangan dimasa – masa yang akan datang kearah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk serta kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pembangunan bangsa.

Kotabaru, 20 Januari 2022

Kepala Dinas,

**Ir. H. Hardhani, M.Si**

Nip.19650401 199308 1 001

Pembina Utama Muda IV/c